Hak Pendidikan Suku Terpencil Disparitas Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Suku Anak dalam di Sungai Terap Serengam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Serolangun

Musa¹, Abdul Kholil², Dedy Isnanto³, Fitrah Wahyudi⁴

- (1) Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Falah Rimbo Bujang Tebo Jambi
- (2) Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Falah Rimbo Bujang Tebo Jambi
- (3) Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Falah Rimbo Bujang Tebo Jambi
- (4) Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Falah Rimbo Bujang Tebo Jambi

✉ Corresponding author
(musa.sagmpdi@gmail.com)

Abstrak

Suku terpencil adalah anomali dalam sebuah kebijakan, hak pendidikan suku terpencil sering mendapat perlakuan yang tidak sama dengan sekolah-sekolah di kota yang mempunyai fasilitas yang lengkap dengan kuantitas dan kualitas guru yang memadai, sementara itu Suku Anak Dalam di Sungai Terap tidak memperoleh hak pendidikan yang layak dikarenakan ketidakberpihakan pemerintah daerah terhadap mereka. Disparitas kebijakan pemerintah daerah menjadi poin penting dalam tulisan ini didasarkan observasi dan wawancara, kebijakan pemerintah daerah tidak memihak kepada Suku Anak Dalam Sungai Terap tercermin dari tidak adanya fasilitas pendidikan yang didirikan pemerintah daerah, tidak menyiapkan guru untuk mendidik dan tidak membuat akses jalan yang memadai menuju sekolah.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Suku Anak Dalam, Pemerintah Daerah

Abstract

Remote tribes are an anomaly in policy, the education rights of remote tribes often receive unequal treatment from schools in cities which have complete facilities with adequate quantity and quality of teachers, meanwhile the Anak Dalam Tribe in Sungai Terap do not receive the same educational rights. feasible due to the regional government's impartiality towards them. The disparity in regional government policy is an important point in this article based on observations and interviews. Regional government policy does not favor the Anak Dalam Sungai Terap Tribe, reflected in the absence of educational facilities established by the regional government, not preparing teachers to educate and not providing adequate road access to school.

Keywords: Education Rights, Inner Tribes, Regional Government

PENDAHULUAN

Suku pedalaman seperti Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama Suku Anak Dalam yang berada di daerah Sungai Terap Serengam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, kurangnya perhatian tersebut dapat terlihat dari tidak adanya fasilitas pendidikan yang memadai di daerah Sungai Terap, kurangnya perhatian pemerintah Daerah juga terlihat dari tidak tersedianya guru dan akses jalan yang tidak layak menuju sekolah.

Pendidikan terhadap suku terpencil di daerah terpencil terkadang harus menghadapi berbagai kendala yang tidak mudah, di berbagai belahan dunia seperti Suku Aborigin di Australia dan Etnis Maori di Selandia baru yang tidak banyak memperoleh akses pendidikan dan bahkan akses politik bagi Etnis Maori tidak dapat terlaksana di Selandia baru (Daniel Dompeipen, 2017).

Berbagai lokasi pendidikan Suku Anak Dalam tidak dapat terlaksana dengan baik, di Muaro Jambi menurut Revis Aswara pendidikan bagi Suku Anak Dalam yang berada di Dusun Selapik tidak mengikuti sekolah formal sama sekali, mereka hanya belajar di sanggar belajar "Meraih Mimpi" dengan fasilitas

seadanya, walaupun menurut Erwan Baharuddin (2010) paradigma suku pedalaman di Indonesia mulai mengalami perubahan, pendidikan sudah mulai dianggap sebagai sesuatu yang penting agar mereka tidak tertipu oleh masyarakat luar dari suku mereka.

Senada dengan Revis Aswara di atas, proses pendidikan Suku Anak Dalam di Sungai Terap Serengam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun juga mengalami hal yang sama, pemerintah daerah tidak memenuhi hak Suku Anak Dalam untuk memperoleh pendidikan, fasilitas pendidikan tidak didirikan oleh pemerintah daerah, bahkan Sekola Rimba untuk Suku Anak Dalam didirikan oleh seorang aktivis yang bergerak di bidang pendidikan yaitu Butet Manurung pada tahun 2003, bukan oleh pemerintah (Arief Maulana, 2021)

Sekola Rimba yang digagas oleh Butet Manurung tersebut tentu saja tidak selengkap dan sebagus sekolah yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah dalam hal ini telah melalaikan kewajiban sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, menyediakan guru yang berkualitas dan membangun akses jalan yang memadai untuk masyarakat Suku Anak Dalam di Sungai Terap. (Observasi, Juli 2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap pendidikan Suku Anak Dalam yang di temui dilapangan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena di Sungai Terap Serengam yang berlokasi di HTI Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dengan metode observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga suku kata populer dalam penyebutan Suku Anak Dalam. Yang pertama "Kubu" istilah ini sering digunakan oleh suku melayu yang mengandung makna, primitif, kotor, dan bodoh, yang kedua adalah "Suku Anak Dalam", istilah ini digunakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial yang artinya Sekelompok orang yang terbelakang dan tinggal di pedalaman, yang ketiga adalah "Orang Rimba". (Muhammad ridho 2018)

Adapun istilah Suku Anak Dalam digunakan untuk menyebut suku terasing yang berada di provinsi Jambi. Istilah yang mempunyai arti sama dengan Suku Anak Dalam adalah Orang Rimba dan Orang Kubu (Wisri, 2014: 49). Orang rimba adalah suku yang hidupnya bergantung pada hutan. Mereka lahir tumbuh dan berkembang biak didalam hutan rimba, mereka bermata pencarian sebagai petani ladang yang berpindah pindah, berburu dan meramu.

Berpindahnya tempat tinggal dahulunya adalah sebuah keharusan Suku Anak Dalam, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini mereka mulai menetap dan membentuk sebuah kelompok yang memiliki tempat tinggal, tentu dengan adanya tempat tinggal membuat pendidikan menjadi penting bagi mereka di masa sekarang, terkait hal itu pemerintah daerah berkewajiban memberikan akses pendidikan yang layak kepada Suku Anak Dalam, baik berupa fasilitas, guru yang profesional dan akses jalan yang baik.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi bangsa Indonesia mengatur secara tegas bahwa pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus didapatkan oleh warga negara, hal ini terlihat dalam Bab XA Pasal 28 C yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Aturan tentang pendidikan dan kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan semakin jelas terlihat dalam Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan Pasal 31 ayat (1) yang mengatur Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Undang Undang-Undang Dasar 1945 di atas, memberikan gambaran betapa besar kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi warga negara, dari mulai menetapkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia atau hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap individu, kewajiban pemerintah lainnya adalah membiayai pendidikan dasar, karena pendidikan dasar adalah hak setiap orang begitu juga dengan pendidikan lanjutan hingga perguruan tinggi.

Pendidikan menjadi fenomena baru dan tantangan tersendiri bagi Suku Anak Dalam, orang tua dari Suku Anak Dalam sebaiknya diberikan pemahaman secara konprehensif terkait pentingnya pendidikan, terutama yang berhubungan dengan baca tulis, berhitung dan lainnya, orang tua dari Suku Anak Dalam perlu mendapatkan bimbingan terkait pendidikan formal atau non formal demi keberlangsungan kehidupan Suku Anak Dalam ke depannya, Peran pemerintah terasa kurang di Sungai Terap Serengam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini

Dinas Pendidikan untuk memberikan saran dan masukan kepada orang tua dari Suku Anak Dalam di Sungai Terap Serengam.

Padahal peran orang tua begitu penting dalam proses pendidikan anak, selain adanya kewajiban bagi pemerintah, ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga diatur mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap peserta didik, hal ini diatur di dalam pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, sedangkan dalam ayat (2) orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya.

Dalam proses pendidikan seseorang, orang tua sangat berperan sekali dalam membentuk kepribadian anak, terutama menyangkut sikap, intelektual dan kematangan anak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu usaha dalam membina tingkah laku anak adalah melalui proses pendidikan, yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Harris Clemes (2001: 19) menyatakan bahwa orang tua dan anak harus membina batasan melalui praktek, orang tua perlu menjelaskan bagi diri mereka sendiri apa yang mereka harapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apa yang diharapkan, termasuk tanggung jawab untuk pekerjaan dan tugas, perlu dinyatakan dengan cara yang bisa dipahami anak, kedua orang tua perlu berpartisipasi dalam menjelaskan aturan kepada anak.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah memberikan dampak negatif terhadap proses pendidikan dan pengenalan pendidikan kepada anak di Sungai Terap Serengam, tidak adanya peran pemerintah yang memadai dalam pendekatan kepada orang tua Suku Anak Dalam membuat proses pembelajaran mengalami berbagai hambatan.

Selain dari kurangnya sosialisasi, fasilitas pendidikan yang tidak layak terlihat dari empat pembelajaran yang sempit, hanya seperti pondok kecil dengan ruangan yang tidak memadai, ini juga merupakan kendala dalam melakukan pembelajaran di sekolah, sekolah mereka yaitu sebuah pondok, pondok ini adalah sebuah bangunan yang di bangun berbahakan kayu, berlantai kayu, tidak memiliki dinding sehingga dindingnya terbuka, walaupun tetap memiliki atap. (Wawancara 03 Oktober 2022), Peneliti juga melihat saat observasi bahwa sarana dan prasarana yang ada itu hanya satu buah pondok yang dijadikan tempat belajar, papan tulis, buku dan spidol, peneliti melihat bahwa guru membuat alat permainan edukatif dari daun. (Observasi 03 Oktober 2022).

Kurangnya tenaga pendidik juga merupakan salah satu kendala yang terjadi di sekolah rimba ini, karena dengan siswa suku anak dalam yang banyak ini yang mengajar hanya 1 orang guru saja, hal ini membuat seorang guru kesulitan karenamengatasi siswa suku anak dalam ini seorang diri.

Guru yang mengajar di Sekola Rimba Sungai Terap hanya seorang diri bernama Aswir, beliau telah mengabdikan dirinya untuk siswa Sekola Rimba demi pendidikan Suku Anak Dalam walaupun hanya seorang diri, keberadaan satu orang guru tentu tidak memadai dalam mendidik siswa di Sekola Rimba Sungai Terap.

Tenaga pendidik merupakan hal yang tak kalah pentingnya untuk membantu dalam pembelajaran pada suku anak dalam ini, dan sangat di butuhkan, akan lebih baik tenaga pendidik ini merupakan guru yang memang di bidang nya, untuk membimbing, mengayomi serta paham akan apa yang akan di ajarkan kepada siswa suku anak dalam ini. Bantuan dinas pendidikan untuk guru mengajar di sekolah rimba merupakan sebuah solusi nya, karena jarang sekali ada suka relawan yang mau mengajar disekolah ini. (Wawancara 03 Oktober 2022), saat observasi peneliti belum melihat ada guru lain yang membantu mengajar di sekolah rimba ini, namun pak Aswir sudah mengajukan ke dinas pendidikan agar segera ada bantuan tenaga pendidik. (Observasi 03 Oktober 2022).

Kondisi jalan yang buruk menjadi kendala guru dalam mengajar, karena lokasi Sekolah Rimba ini di dalam hutan, yang mana sangat sulit dijangkau. Apalagi jika cuaca hujan maka guru tidak bisa masuk ke dalam menuju lokasi sekolah. Jalan yang di tempuh menuju ke sekolah sangat buruk, hingga pembuatan jalan menuju ke lokasi sangat di butuhkan, kerja sama dengan masyarakat, Suku Anak Dalam, serta pemerintahan daerah juga di perlukan untuk pembuatan jalan ini, dan solusi lain nya itu dengan mendirikan sekolah di tempat yang jalan nya bisa di tempuh, namun solusi ini sulit di terapkan karena tidak semua anak suku dalam boleh pergi ketempat yang jauh dari tempat tinggal mereka. (wawancara 03 Oktober 2022).

Saat melakukan Observasi peneliti melihat ada beberapa kayu yang di letakkan di jalan yang berlubang serta jalan yang becek agar bisa di tempuh dan tidak melewati gubangan lumpur, dan hal itulah merupakan kerja sama dari suku anak dalam dan masyarakat sekitar yang ikut membantu. (Observasi 03 Oktober 2022).

Sesuai dengan perintah undang-undang dasar 1945, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan sistem pendidikan nasional, maka pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, walaupun sebelumnya telah ada Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akan tetapi karena tidak memadai lagi akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku hingga saat ini.

Keinginan pemerintah untuk melaksanakan reformasi bidang pendidikan lebih nampak lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun substansi dari Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut nampak dari visinya: terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu pro-aktif menjawab tantangan zaman.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat penting sebagai perwujudan dari usaha pemerintah menjadikan pendidikan sebagai aset penting negara dan bagian dari persiapan terhadap kepemimpinan negara di masa depan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur berbagai hal yang menjadi landasan yuridis pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan produktif menurut Yayat (1986: 189) merupakan sebuah keharusan, akan tetapi untuk mencapainya membutuhkan pengorganisasian lembaga pendidikan dengan mutu yang tinggi, pengorganisasian yang bermutu diantaranya adalah tenaga personal pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga inti dan penunjang kependidikan, Sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi kurikulum, buku, media pendidikan dan bangunan serta perlengkapan.

Tujuan pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari tujuan pendidikan tersebut sangat ditekankan mengenai berkembangnya peserta didik, karena perkembangan dengan berbagai tahapannya memiliki permasalahan masing-masing di setiap individu peserta didik. Guru harus mampu memahami setiap peserta didik dengan tahapan fungsi motorik dan kognitifnya dalam rangka mencapai pendidikan berkualitas.

Konsep pendidikan yang berkualitas, perhatian utama ditujukan kepada anak didik. Setiap aspek pelayanan pendidikan diperuntukkan bagi terwujudnya aktivitas belajar pada anak didik. Demi terwujudnya aktivitas belajar yang efektif, maka pendidikan hendaknya secara psikologis. Pendidikan yang psikologis dalam arti bahwa, pendidikan itu berorientasi kepada sifat dan hakikat anak didik sebagai manusia yang berkembang (Soemanto, 2006: 5)

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) mewajibkan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pendidikan dasar, adapun pendidikan dasar yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar".

Kewajiban bagi warga mengikuti pendidikan dasar di atas, diiringi dengan kewajiban bagi pemerintah membiayai pendidikan dasar, kewajiban tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diaplikasikan dalam berbagai kebijakan, baik dalam pembentukan peraturan-peraturan maupun kebijakan keuangan negara.

AriKunto (1990: 239) menjelaskan secara rinci bahwa guru adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siswa dalam suatu proses pembelajaran di kelas. Profesionalitas guru dalam suatu pembelajaran sangat perlu dan penting. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yaitu menguasai bahan meliputi; menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum, dan menguasai bahan penunjang bidang studi, mengelola program pengajaran berupa merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program pengajaran dan mengenal kemampuan anak didik.

Betapa penting peran guru dalam membentuk pribadi siswa, terlihat dari hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang pendidik seperti di atas, menggambarkan kualitas seorang guru yang harus ditingkatkan terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin menuntut guru untuk berinovasi dalam sistem pengajaran di sekolah.

Hamka (2012: 19) dalam kutipannya memaparkan bahwa guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Digugu artinya diindahkan atau dipercayai. Sedangkan ditiru artinya dicontoh atau diikuti. Dalam bahasa Sansakerta, kata guru adalah gabungan dari kata "gu" dan "ru". "gu" artinya kegelapan dan kekelaman. Sedangkan "ru" artinya melepaskan, menyingkirkan, membebaskan.

Sedangkan menurut Kartasapoetra (2007:31) Guru merupakan orang yang berperan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di masjid, surau/musholla, di rumah, dan sebagainya.

Menurut jejen mustofa (2015:30) untuk menjadi guru yang profesional, di bawah ini digambarkan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional

Beberapa kompetensi di atas sangat menentukan profesionalitas dan kualitas dari seorang guru, kualitas dan profesionalitas tidak bisa terlepas juga dari pengalaman pribadi seorang guru dalam mengabdikan dirinya untuk siswa yang dididiknya

Beberapa pengertian di atas, ternyata guru dalam masyarakat tidak hanya yang berada di lingkungan sekolah, tetapi juga bisa berada di tempat yang tidak formal, yang terpenting dari peran seorang guru adalah mengajarkan dan membimbing siswanya menjadi pribadi yang berakhlak dan berakhlak mulia dengan berbagai jenis kualifikasi pendidikan baik formal maupun non formal.

Konsideran menimbang huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas.

Merujuk pada konsep yang dianut oleh lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang dikutip oleh Sudarwan Danim (2002: 32) bahwa guru harus memiliki sepuluh kompetensi mengajar yaitu, mengembangkan kepribadian, menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses belajar-mengajar, menyelenggarakan program bimbingan sekolah, menyelenggarakan administrasi sekolah, kerjasama dengan sejawat dan masyarakat dan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.

Keterangan di atas menggambarkan guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam proses belajar mengajar maka ia akan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Suryosubroto (1977: 20) mengemukakan bahwa "guru yang kompeten akan lebih mampu mengelola Proses Belajar Mengajar, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal".

Kekurangan tenaga pendidik di Sekola Rimba Sungai Terap Serengam Kecamatan Air Hitam Kabupaten sarolangun menjadikan Suku Anak Dalam tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di atas, sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Suku Anak Dalam dapat memperoleh pendidikan seperti yang seharusnya didapatkan, negara berkewajiban berperan penting dalam memfasilitasi semua kegiatan pendidikan di seluruh Indonesia.

SIMPULAN

Pemerintah daerah dengan segala kewajibannya telah mengabaikan sebagian Suku Anak Dalam yang terpencil, sarana dan prasarana yang tidak memadai memberikan dampak kurang positif terhadap proses dan pengembangan pendidikan di Sungai Terap Serengam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, padahal pemerintah mempunyai instrumen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan terhadap setiap warga negara, kewajiban yang terabaikan ini membuat masyarakat harus berjibaku memenuhi sendiri kebutuhan pendidikan Suku Anak Dalam di Sungai Terap, dengan berbagai macam cara agar Suku Anak Dalam di Sungai Terap memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas

DAFTAR PUSTAKA

- Hamka. 2012. *Karakter Guru Profesional*. Jakarta : Al-Mawardi Prima.
- Harris. 2001. *Petunjuk Praktis Bagi Orang Tua dan Guru*. Jakarta : Mitra Utama.
- Jejen Mustofa. 2015. *Peningkatan Kompetensi Guru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kartasapoetra. 2007. *Sosiologi Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarwan Danim. 2002. *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suryosubroto. 1977. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemanto. 2006. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yayat R. 1986. *Studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Sistem Administrasi Akademik*. Bandung: IKIP Bandung.
- <https://www.unpad.ac.id/2021/03/kisah-butet-manurung-penggagas-sokola-rimba-yang-meraih-dua-gelar-sarjana-di-unpad/>
- Daniel Dompeipen (2017) *Hambatan dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Penduduk Asli: Etnis Aborigin di Australia dan Etnis Maori di Selandia Baru*, Skripsi Ilmu Hubungan Internasional.

- Erwan Baharuddin (2010) *Pendidikan Suku Anak Dalam: Suatu Perubahan dari Paradigma Postivistik ke Konstruktivisme*, Vol 7, No 2.
- Ridho M, (2018) Tesis Budaya Lokal Dan Pendidikan Islam : *Studi Kasus Suku Anak Dalam Di Jambi*
- Wahyuni, mila. (2016) *Strategi komunikasi Islam dalam pembinaan Agama pada Suku Anak Dalam Bukit Duo Belas Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun*, Vol 1, No 1.
- Wisri. (2014) *Dakwah pada masyarakat terasing Sukorejo Situbondo*.
- Syamsudhuha Saleh. (2014) *Agama kepercayaan dan kelestarian lingkungan studi terhadap gaya hidup orang rimba menjaga lingkungan dibukit dua belas jambi*, Vol.4, No 3.
- Republik Indonesia "Undang-Undang Dasar 1945".
- Republik Indonesia "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional".
- Republik Indonesia "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen"
- Republik Indonesia "Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru".